



Lingkungan Strategis

Singapura Memanfaatkan Posisinya

Sementara bangsa kita masih terus diguncang oleh berbagai krisis, plus makin meningkatnya ancaman disintegrasi bangsa, Singapura berbenah diri untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu negara terkuat di Asia. Berbicara di depan civita academica lingkungan National University of Singapore (NUS), PM Goh Chock Tong mengemukakan tiga syarat mutlak bagi negaranya untuk survive. Ketiga syarat itu adalah: (a) kepemimpinan politik yang kuat, (b) institusi nasional yang sehat dan (c) rakyat yang berkualitas tinggi.

Singapura, kata PM Goh, harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kuat, baik dan kompeten. Di tangan merekalah nasib Singapura tergantung. Pemimpin-pemimpin berkualitas seperti ini tidak bisa dihasilkan oleh sebuah sistem pemilu yang sedemokratis apa pun. Goh tidak memaparkan bagaimana cara mencetak pemimpin yang baik. Yang jelas, ia mendukung pendapat seorang pakar bernama Adlai Stevenson yang mengatakan dalam sistem demokrasi, siapa pun bisa menjadi pemimpin. Tapi, pemimpin hasil pemilu tidak menjamin kualitas yang diinginkan bangsa. Meski tidak merinci apa yang dimaksudkannya, kita di Indonesia kira-kira dapat menangkap arti di balik kritik Goh. Tengoklah contoh riil di negara kita.

KH Abdurahman Wahid dipilih sebagai Presiden RI secara demokratis. Namun, setelah setahun memimpin bangsa, semakin banyak pihak

yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Gus Dur. Desakan agar Gus Dur mengundurkan diri demi kepentingan bangsa kian luas. Seorang sosiolog Universitas Indonesia, DR Imam Prasojo, meniai terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden pada 1999 adalah suatu "kecelakaan nasional". Tidak kalah Amien Rais, sponsor utama Gus Dur, akhirnya mengaku keliru menjadikan Gus Dur Presiden RI. Maka ia pun meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas kesalahan yang dilakukannya ketika itu.

Jelas, jika diukur dengan standar PM Goh, Gus Dur bukanlah "a strong competent and good leader". Tapi, dia dipilih melalui suatu mekanisme yang sangat demokratis, kan? Kasus ini menunjukkan demokratis tidak selamanya berjalan efektif. Goh mungkin ingin menawarkan jalan alternatif, yaitu melalui saringan ketat yang berjenjang dan teruji untuk mendapatkan pemimpin bangsa yang kuat. Untuk itu, semua pihak dituntut Partisipasinya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mengabdikan bangsa.

Syarat kedua adalah memiliki institusi nasional yang sehat. Goh menyebut beberapa institusi yang memainkan peran kunci dalam memajukan negaranya: birokrasi, angkatan bersenjata, polisi, lembaga kepresidenan, sistem hukum, parlemen dan serikat buruh. Lembaga-lembaga tsb, menurut Goh, berjasa menciptakan stabilitas nasional di

Singapura.

Di Indonesia, stabilitas biasanya hanya dikaitkan dengan keamanan dan militer. Jika ABRI atau TNI kuat dan solid, maka stabilitas pun dikatakan "aman dan terkendali". Padahal, stabilitas menurut konsep Singapura memiliki jangkauan yang sangat luas. Goh seolah hendak bertanya: mana bisa stabilitas dipelihara jika moral birokrasi suatu negara anjlok (dalam arti, birokrat hanya bekerja untuk dilayani, bukan melayani?) Mana bisa kita bicara tentang stabilitas jika parlemen tidak berfungsi, atau law enforcement menyedihkan?

Sound institutions yang dimaksud oleh Goh, tentu termasuk juga para operatormya, yaitu orang-orang yang menjalankan institusi itu. Mereka mestinya bekerja dengan dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi demi kemajuan bangsa.

Masa depan Singapura juga bergantung pada kualitas rakyat Singapura. Dikatakan oleh Goh bahwa negaranya membutuhkan "sensible, practical and talented people" untuk menjawab tantangan abad ke-21. Abad baru itu dilukiskan sebagai abad yang lebih banyak tantangan dan ketegangan. Namun, Goh yakin kemakmuran negaranya bisa dijamin selama tiga pilar itu kepemimpinan yang kuat, instansi yang sehat dan rakyat yang berkualitas dimilikinya.

Pemimpin-pemimpin kita sering tidak senang jika diminta pendapatnya mengenai kehebatan Singapura. Alasannya, Singapura hanyalah sebuah negara mini; sedang Indonesia "negara raksasa" yang mempunyai permasalahan amat kompleks, sehingga dinilai kurang relevan untuk dibandingkan satu sama lain. Argumentasi seperti ini kiranya cuma excuse untuk menutupi kekurangan dan kegagalan kita menata negara. Yang jelas makin lama Singapura tampak makin kuat dan makin jaya. Sebaliknya, Indonesia kini dalam situasi yang amat memprihatinkan. Malah tidak berlebihan jika dikatakan nama Indonesia di percaturan dunia saat ini nyaris terpuruk sekali (TL)



**Strategic
Environment**

Singapore Strengthens its Position

While Indonesia remains in the throes of numerous crisis, even threats of national disintegration, Singapore has revamped itself whereby to further consolidate its position as one of the strongest Asian nations. Addressing Singapore's National University's civil academy, PM Goh Chock Tong set out three absolute requirements for the nation's survival. These were: a) strong political leadership, b) healthy national institutions, and 3) a high quality populace.

Singapore, he said, must be able to produce strong leaders who are men of competence and integrity. The fate of Singapore will rest in their hands. Such leaders can not be produced by a political system – no matter how democratic. He did not explain how such leaders were produced but, what became clear, is that he supports the views of Adlai Stevenson who said that under a democratic system anybody can become the leader. A leader democratically chosen does not necessarily provide the quality of leader that a nation may wish to have. He did not expound on this at any depth, but we Indonesians could perhaps suspect what he had in mind with this criticism. We can look at the example of our nation.

KH Abdurrahman Wahid was democratically chosen as the leader of the Indonesian nation. One year after leading the nation, however, there

are growing numbers of people discontented with his leadership. There are growing demands that he step down in the national interests. A University of Indonesia sociologist, DR Imam Prasajo, regards the election of Gus Dur in 1999 as a national tragedy. No less dramatic, Amien Rais, Gus Dur's primary sponsor, finally conceded that he had made a mistake in making Gus Dur the President. He has made a public apology to the Indonesian people for this mistake.

Clearly Gus Dur does not meet PM Goh's criteria of a "a strong, competent and good leader". Yet he was chosen through a very democratic mechanism, wasn't he? This case shows how democracy does not always operate effectively. Perhaps Goh wishes to propose an alternative: a very strict and prolonged screening process to establish a strong national leader. This calls for the participation of all in creating a conducive environment whereby all may have the same opportunity to be of service to their nation.

The second condition involves that of strong national institutions. Goh has mentioned that institutions play a major role in national advancement through bureaucracy, the armed forces, the police, the presidency, the legal system, parliament and trade unions. These institutions, Goh records, have contributed to Singapore's stability.

In Indonesia stability is usually only linked with security and the military. If ABRI or TNI are strong and solid then stability is deemed to be "safe and controlled". In fact, under the Singaporean analysis, stability has a much broader implication. Goh seems to asking how stability can be maintained when the morality of the state bureaucracy has collapsed (where bureaucrats only seek to be served). How can we speak of stability if parliament doesn't function or law enforcement is in tatters?

"Sound Institutions" as intended by Goh, certainly covers the operators of these; the people who allow the institution to function. They must work with high dedication and accountability towards national advancement.

The future of Singapore also depends on the quality of Singaporeans; in Goh's terms "sensible, practical and talented people". It is these people who can meet the demands of the 21st century. This century seems pregnant with challenges and stresses, Goh, however, feels secure that his nation's prosperity can be guaranteed so long as his "three pillars" – strong leadership, healthy institutions, and a quality populace – remain in place.

Our leaders are often reluctant and uncomfortable when questioned on the impressive achievements of Singapore. The reason given is that Singapore is only a "mini nation" whilst Indonesia is a "giant" with extremely complex issues to address. They suggest that comparisons with Singapore are not relevant. These arguments seem little more than excuses whereby to smooth over our inability set our own country in order. It remains clear that Singapore continues to move from strength to strength. On the other Indonesia is in an increasingly perilous situation; indeed Indonesia's place on the international scene has almost completely collapsed. (TL)

Lingkungan Strategis

Kerjasama Militer RRC - Rusia

Hubungan kerjasama Rusia dan RRC, tampaknya, makin mesra saja, termasuk kerjasama di bidang militer. Bulan Nopember yang lalu paling sedikit ada tiga delegasi tingkat tinggi Rusia mengunjungi Cina, masing-masing dipimpin oleh Deputi Perdana Menteri Ilya Klebanov, Perdana Menteri Mikhail Kasyanov dan Presiden Vladimir Putin. Aktivitas diplomatik tingkat tinggi yang sangat intensif ini hanya memperkuat dugaan selama ini dikalangan pengamat internasional bahwa Rusia dan RRC sedang menuju aliansi strategis yang mungkin akan mempengaruhi peta kekuatan global.

Kunjungan PM Ilya Klebanov ke Beijing membuahkan persetujuan jual-beli A-50 airborne radar system, sistem pengawasan dan pengendalian dini udara yang di Amerika dikenal dengan nama AWACS. Dalam perjanjian itu, Rusia setuju menjual tujuh unit A-50. Dua diantaranya akan segera dioperasikan; sedang lima lainnya masih menunggu perlengkapan militer lebih canggih lagi buatan Institut Penelitian Ilmiah Moskwa yang akan dipasang di A-50 itu. Tatkala Putin datang, para pemimpin teras Cina pun menyambut mereka dengan wajah penuh keceriahan.

Cina memang sangat membutuhkan AWACS untuk mendukung operasi militernya, khususnya radar itu, angkatan udara RRC dapat memonitor gerak-gerik pesawat musuh secara dini, sehingga serangan udara mereka bisa dihalau. Sebelumnya, Cina sudah sepakat untuk membeli beberapa unit AWACS dari Israel (Phaloon, namanya) senilai AS\$ 250

juta. Radar-radar itu semula akan dipasang di pesawat tempur Ilyushin 76 buatan Rusia milik Cina yang mempunyai jarak tempuh 3.000 km. Namun, transaksi itu kemudian gagal direalisasi karena Israel ditekan Amerika untuk membatalkannya. Washington curiga RRC akan memanfaatkan sistem radar canggih itu untuk kepentingan ofensif ketimbang defensif. Dalam konteks ketegangan di semenanjung Taiwan selama dua tahun terakhir, pemilikan AWACS oleh RRC memang mempunyai arti yang sangat penting.

Gagal memperoleh pasokan peralatan militer canggih dari Israel karena diblokir oleh Washington, RRC berpaling pada negara tetangganya, Rusia. Pada saat yang sama, pemimpin-pemimpin Rusia kian kecewa melihat ulah Amerika yang terkesan semakin merajalela dalam menjalankan perannya sebagai "polisi dunia". Pembentukan kaukus "Shanghai Five" beberapa waktu sebelumnya kiranya juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu pernah terlibat peperangan secara terbuka dalam upaya mengurangi keadidayaannya Amerika. "Shanghai Five" terdiri atas RRC, Rusia dan tiga negara Asia Tengah yang dulunya bergabung dalam negara Uni Soviet. Intinya, kaukus itu menyatakan tekadnya untuk menjalin kerjasama, khususnya untuk menghalau setiap ancaman separatisme yang berkecamuk di negara anggota masing-masing.

Pembangunan militer RRC belakangan ini tampaknya berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. RRC kini praktisi telah memiliki semua perlengkapan militer yang canggih;

dari bom nuklir, kapal selam bertenaga nuklir, rudal jarak jauh yang bisa menjelajah hingga kota-kota besar dipantai barat Amerika, sehingga tank-tank berkaliber besar. Pembangunan militer itu tidak bisa dilepaskan dari bantuan-bantuan langsung Rusia (sebelumnya, Uni Soviet). Negara-negara sering menunjukkan sikap tidak senang terhadap kenyataan ini. Pertama, Cina dikhawatirkan akan bersikap lebih keras dalam menghadapi Taiwan jika posisi militer mereka semakin kuat. Keculai itu, Cina juga dikhawatirkan akan "mengeksport" tek-nologi militernya kepada negara-negara sedang berkembang lain, khususnya negara-negara Timur Tengah yang sedang berseteru dengan Israel, sekutu kental AS.

Kekhawatiran seperti itu bisa saja mengandung justifikasi kuat. Namun sebagai negara berdaulat, RRC tentu mempunyai hak untuk terus memperkuat dirinya, termasuk membangun angkatan bersenjata. Tentu, RRC juga memiliki justifikasi sendiri untuk itu yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain manapun. Yang jelas tekanan RRC terhadap Taiwan akhir-akhir ini semakin keras, RRC seperti memiliki jadwal sendiri untuk secepatnya mengembalikan Taiwan ke Pangkuannya. Dan sejumlah pemimpin teras Cina pernah terang-terangan mengatakannya bahwa mereka tidak menaifkan cara militer untuk merealisasi tujuan tersebut. Pembangunan angkatan bersenjata Cina bisa dipandang sebagai sinyal kepada pihak manapun untuk tidak sekali-kali merencanakan keinginan Cina itu (TL).



Strategic Environment

Chinese - Russian Military Cooperation

Ties between Russia and China appear to be becoming increasingly intimate, including even matters of military co-operation. Last November there were at least three high level Russian delegations that visited China. These were led by Deputy PM Ilya Klebanov, PM Mikhail Kasyanov and President Vladimir Putin. These intense high level diplomatic initiatives strengthened suspicions that Russia and China were moving towards a strategic alliance that would, perhaps, influence the global power map.

The visit by PM Ilya Klebanov to Beijing resulted in an agreement to buy the A-50 airborne radar system; a parallel of the American AWACS early warning system. Under this agreement Russia has agreed to sell 7 of these planes. Two of these will be promptly operational while the other 5 will await fitting with more ultra-modern military equipment from the Moscow Science Institute. Putin's arrival in China was very warmly greeted by the Chinese leaders.

China is in dire need of these planes to back its military operations, especially if war with Taiwan becomes inevitable. With this radar system, the Chinese airforce can get early cognizance of any enemy aircraft movements whereby their attacks can be turned back. China had already agreed to buy several AWACS from Israel (named Falcons) at US250 million. This radar was initially going to be fixed to the Russian Ilyushin 76 planes that have a range of 3,000 km. This transaction, however, failed to

There are also fears that China will export its military technology to developing nations - especially those in the Middle - East who are antithetical to Israel, America's firm ally.

eventuate through American pressure on Israel to cancel it. Washington was suspicious that China sought to use the system for offensive rather than defensive purposes. In context of the heightened tensions between Taiwan and China over the last few years, China's possession of these AWACS takes on special significance.

Having failed to gain this hi-tech military technology from Israel through American intervention, China turned to neighboring Russia. It was at this time that the Russian leadership were becoming increasingly annoyed at the manner in which America was conducting its "world policeman" role. Formation of the "Shanghai Five" caucus shortly prior to this seems to have had the same objective; a rapprochement between great powers that had both been involved in wars to help prevent American dominance. "The Shanghai Five" consisted of China, Russia and three other nations formerly part of the Soviet Union. Essentially this grouping declared its

intention to co-operate - especially towards prevention of any threats of separatism emerging in any member country.

Military growth in China is proceeding rapidly. China now has practically every military mod-con; from nuclear weapons, nuclear submarines, inter-continental missiles that can reach large west coast American cities, and high caliber tanks. This growth has been promoted by direct Russian (earlier Soviet Union) assistance. Other nations have expressed fears over this development. China, it is feared, will take a stronger line with Taiwan if their military position grows stronger. There are also fears that China will export its military technology to developing nations - especially those in the Middle-East who are antithetical to Israel, America's firm ally.

These kinds of fears are certainly justified, but, as a sovereign state, China clearly has the right to strengthen itself - including militarily. China would also insist that no other nations have the right to interfere in Chinese internal affairs. Chinese pressure on Taiwan has been mounting noticeably recently. It seems that China has its own timetable for the rapid return of Taiwan and senior Chinese leaders have pointedly stressed that they will not eschew a military option to achieve this. Its recent boost in military capacity should serve as a warning to all not to underestimate the will of the Chinese.



Profil of Our Contributors



■ **Hasyim Djalal**

Professor of Political and Legal Science at UNPAD (Padjadjaran University)

■ **Amir Santoso**

Senior Lecturer from Indonesian University

■ **Hilman Adil**

Political Observer from LIPI

■ **Riza Sihbudi**

Observer on International Affair from CSIS

■ **Wahyono SK**

Managing Director of TELSTRA magazine

■ **Tjipta Lesmana**

Observer on International Affair

